



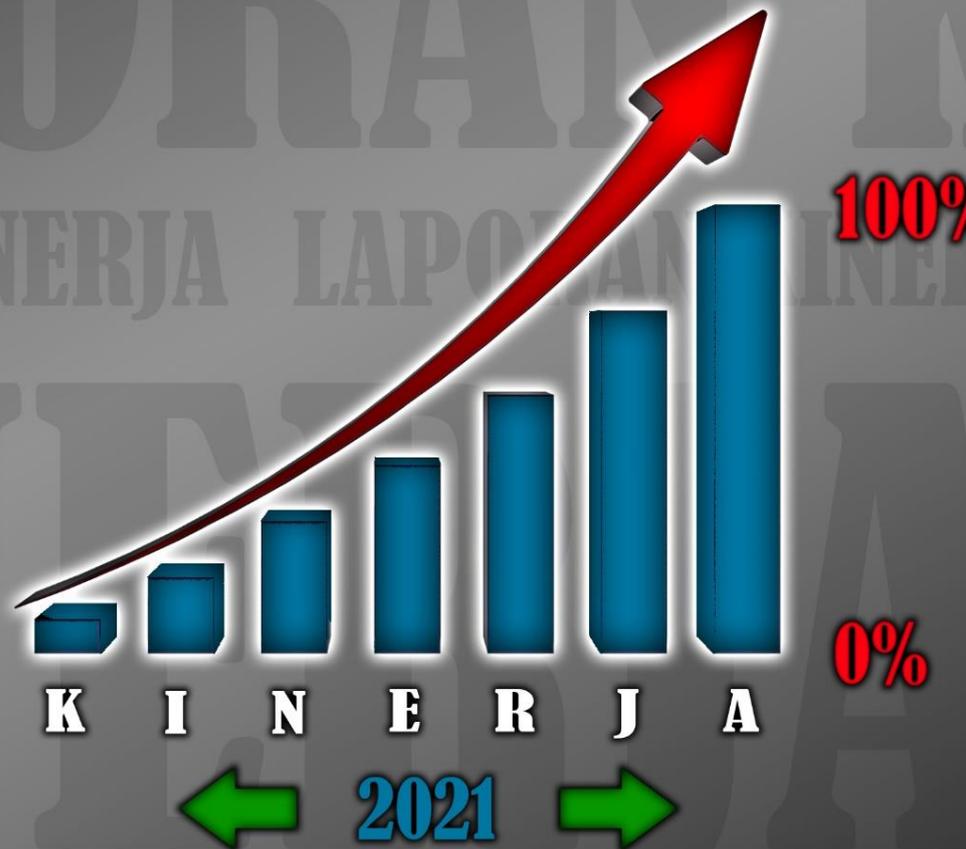
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Ahmad Yani Telp. (0561) 736541 Fax. (0561) 730062
PONTIANAK - 78124

LAPORAN KINERJA

2021



BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan karunianya Laporan Kinerja Biro Administrasi Pembangunan tahun anggaran 2021 dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja merupakan bagian dari penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang telah diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Dalam laporan kinerja ini dijelaskan secara ringkas dan lengkap mengenai capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD).

Laporan Kinerja Biro Administrasi Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa sebagai pertanggungjawaban tahunan atas keberhasilan dan kegagalan dalam mengemban tugas dibidang pengendalian administrasi pembangunan dan pengadaan barang/jasa. Kami menyadari masih terdapat kekeurangan dalam penyusunan laporan ini, untuk itu kami mengharapkan masukan dan perbaikan terhadap laporan kinerja ini.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati kami ucapkan banyak terima kasih kepada pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan laporan ini, semoga bermanfaat bagi kita semua.

Pontianak, Januari 2022

Pt. KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN,

Dra. ANA PAULA MACEDO DE SOUSA MOTA

Pembina Tingkat I

NIP. 19640403 198503 2 015



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
B. Permasalahan Utama (Strategic Issued)	6
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	7
A. Rencana Strategis	7
B. Perjanjian Kinerja	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	11
A. Capaian Kinerja	11
B. Realisasi Anggaran	20
BAB IV PENUTUP	23
Lampiran Pengukuran Kinerja	24



BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, pada Bab II pasal 2 huruf a disebutkan bahwa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat merupakan Sekretariat Daerah Tipe A.

Menindaklanjuti Peraturan Daerah di atas, telah ditetapkan pula Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Mengacu pada pasal 5 angka (1) Peraturan Gubernur tersebut di atas, Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari:

- a. Sekretaris Daerah
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, sebagai koordinator :
 - 1) Biro Pemerintahan;
 - 2) Biro Hukum; dan
 - 3) Biro Kesejahteraan Rakyat.
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, sebagai koordinator :
 - 1) Biro Perekonomian;
 - 2) Biro Pengadaan Barang dan Jasa;
 - 3) Biro Administrasi Pembangunan; dan
- d. Asisten Administrasi dan Umum, sebagai koordinator :
 - 1) Biro Organisasi;
 - 2) Biro Umum; dan
 - 3) Biro Administrasi Pimpinan;



2. Susunan Organisasi

Susunan/Struktur Organisasi Biro Administrasi Pembangunan yang terdapat dalam lampiran Peraturan Gubernur diatas, adalah sebagai berikut :

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Biro Administrasi Pembangunan
Setda Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021



3. Tugas Pokok dan Fungsi

Pada pasal 174 dijelaskan bahwa **Biro Administrasi Pembangunan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas merumuskan dan mengkoordinasikan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, serta pelaporan pelaksanaan pembangunan.



Selanjutnya pada pasal 175 dijelaskan bahwa untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174, Biro Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan program kerja pada bidang administrasi pembangunan;
- b. Perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, serta pelaporan pelaksanaan pembangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Penyelenggaraan kegiatan urusan pemerintah provinsi di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, serta pelaporan pelaksanaan pembangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan koordinasi di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, serta pelaporan pelaksanaan pembangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, serta pelaporan pelaksanaan pembangunan di lingkungan Pemerintah Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, serta pelaporan pelaksanaan pembangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. Pelaksanaan tugas fungsi lain di bidang administrasi pembangunan yang diserahkan oleh Gubernur, Sekretaris Daerah atau Asisten Perekonomian dan Pembangunan.



4. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan tidak terlepas dari sumber daya aparatur, baik ditingkat struktural maupun fungsional. Berdasarkan data per 31 Desember 2021, Biro Administrasi Pembangunan didukung oleh 42 Pegawai Negeri Sipil. Adapun komposisi Sumber Daya Manusia tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 1.1

Data Pegawai menurut Analisis Beban Kerja (ABK) Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021

NAMA SATUAN ORGANISASI/JABATAN	STANDAR KEBUTUHAN SDM APARATUR (ABK)	ASN TAHUN 2021
1	2	3
Kepala Biro Administrasi Pembangunan	1	0
A. Kepala Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1	1
a. Kepala Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	1	1
1) Fungsional Tertentu	-	-
2) Fungsional Umum	3	3
b. Kepala Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	1	1
1) Fungsional Tertentu	-	-
2) Fungsional Umum	3	2
c. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro	1	1
1) Fungsional Tertentu	-	-
2) Fungsional Umum	16	8
B. Kepala Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	1	1
a. Kepala Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah I	1	1
1) Fungsional Tertentu	-	-
2) Fungsional Umum	4	2
b. Kepala Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah II	1	1
1) Fungsional Tertentu	-	-
2) Fungsional Umum	4	3
c. Kepala Sub Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah III	1	1
1) Fungsional Tertentu		
2) Fungsional Umum		
C. Kepala Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	1	1
a. Kepala Sub Bagian Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	1	1
1) Fungsional Tertentu	-	-
2) Fungsional Umum	3	2
b. Kepala Sub Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1	1
1) Fungsional Tertentu	-	-
2) Fungsional Umum	2	3
c. Kepala Sub Bagian Kebijakan Pembangunan Daerah	1	1
1) Fungsional Tertentu	-	-
2) Fungsional Umum	4	3



TOTAL	51	42
--------------	-----------	-----------

Berdasarkan data di atas, Biro Administrasi Pembangunan hanya memiliki 42 orang pegawai negeri sipil, dimana kondisi tersebut masih belum mencukupi kebutuhan ideal yaitu sekitar 51 orang dengan memperhatikan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

5. Sumber Daya Keuangan

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Biro Administrasi Pembangunan tahun anggaran 2021, anggaran yang tersedia pada DPA guna mendukung pelaksanaan kegiatan sebesar Rp. 841.244.380,00 dan mengalami penambahan pada DPPA menjadi Rp. 841.244.380,00. Adapun rincian pagu anggaran dan realisasi anggaran dapat dilihat pada BAB III mengenai Akuntabilitas Kinerja.

6. Sarana dan Prasarana

Selain sumber daya aparatur dan sumber daya keuangan, faktor penunjang pelaksanaan kegiatan dalam mencapai target kinerja yang ditetapkan adalah sarana dan prasarana. Adapun informasi mengenai aset tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2

Rekapitulasi Buku Inventaris Biro Administrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021

NO	JENIS ASET	JUMLAH UNIT	TOTAL NILAI
1.	Peralatan dan Mesin	1013	1.217.866.639,00
2.	Aset Tak Berwujud	4	123.691.849,00
	TOTAL	1017	1.341.558.488,00

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa yang menjadi kewenangan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat untuk dicatat dalam buku inventaris hanya golongan Peralatan dan Mesin dan Aset Tak Berwujud.



B. PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUED*)

Dalam merumuskan isu-isu strategis/permasalahan utama, perlu dicermati kembali faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan dalam pelayanan SKPD. Adapun faktor tersebut diatas antara lain kurangnya tingkat kesadaran pentingnya penyampaian laporan administrasi pembangunan tiap-tiap Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi Kalimantan Barat guna memudahkan pimpinan dalam melakukan monitoring dan evaluasi. Adapun hal-hal yang mempengaruhinya antara lain :

- a. Sistem pelaporan yang masih belum terpusat pada satu pintu, sehingga Perangkat Daerah kesulitan memenuhi semua permintaan laporan.
- b. Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki tiap-tiap Perangkat Daerah belum memadai baik dalam hal kualitas maupun kuantitas.
- c. Sarana dan Prasarana pendukung pada beberapa Perangkat Daerah masih belum memadai.

Selain itu, Situasi Pandemi Covid-19 yang masih terus mengalami naik turun ikut mempengaruhi kinerja pelaksanaan administrasi pembangunan tiap-tiap perangkat daerah.

Dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat khususnya pada bidang pengendalian administrasi pembangunan, dapat diproyeksikan tingkat keberhasilan capaian penyelenggaraan pembinaan administrasi pembangunan ditangani Biro Administrasi Pembangunan.

Dari faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan SKPD di atas, dapat dikemukakan isu-isu strategis pada Biro Administrasi Pembangunan, yaitu :

1. Mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional guna mewujudkan pelayanan yang optimal.
2. Memberikan pemahaman terhadap penggunaan teknologi informasi guna memudahkan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerja.
3. Memfasilitasi koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan dalam hal administrasi pelaksanaan pembangunan.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENSTRA

1. Visi

Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah.

Visi juga berkaitan dengan keberadaan instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan, agar bekerja secara konsisten, antisipatif, inovatif serta produktif.

Biro Administrasi Pembangunan mendukung Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat yang telah tertuang dalam Rancangan Program Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 yaitu :

**“Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat melalui
Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Tata Kelola
Pemerintahan”**

Visi tersebut diharapkan menjadi acuan Biro Administrasi Pembangunan dimasa yang akan datang dalam pelaksanaan pembangunan yang optimal. Guna mewujudkan visi tersebut, telah ditetapkan Misi Pembangunan yang harus dilaksanakan.

2. Misi

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Misi Pembangunan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat untuk periode 2018-2023 yaitu

- a. **Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur**, yaitu mempercepat penyediaan infrastruktur jalan, jembatan, energi listrik dan air bersih, menambah ruang terbuka hijau, membangun pelabuhan samudra, dan meningkatkan kapasitas pelabuhan udara agar bisa didarati jenis pesawat berbadan besar, yang diorientasikan untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi dan untuk membantu peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat.
- b. **Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip *Good Governance***, yaitu meningkatkan kualitas aparatur baik



intelektual maupun moral agar lebih transparan, partisipatif, responsif, efisien, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik serta mampu mengikuti perubahan lingkungan eksternal dan internal, sekaligus mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan tersebut. Selanjutnya untuk mengurangi rentang kendali pemerintahan maka akan diwujudkan melalui pemekaran daerah yaitu dalam jangka pendek terbentuknya Provinsi di bagian timur Kalimantan Barat, yaitu Provinsi Kapuas Raya beserta pemekaran Kabupaten Sambas, Sanggau, Ketapang, dan Kapuas Hulu dan dalam jangka panjang terbentuknya Provinsi di bagian selatan Kalimantan Barat, yaitu Provinsi Ketapang (Tanjungpura).

- c. **Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan inovatif**, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan, dan memperkuat kehadiran nilai-nilai keagamaan dalam proses pendidikan untuk membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- d. **Mewujudkan masyarakat sejahtera**, yaitu dengan mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, mempertegas keberpihakan pemerintah terhadap kelompok masyarakat dan wilayah yang kurang beruntung, menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek pelayanan sosial, dan mempercepat proses hilirisasi dengan memperkuat sinergi antara sektor pertanian dalam arti luas dan sektor pertambangan dengan sektor industri pengolahan.
- e. **Mewujudkan masyarakat yang tertib**, yaitu dengan menciptakan kehidupan masyarakat yang harmoni antar kelompok, etnis, agama, dan wilayah.
- f. **Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan**, yaitu dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi.



Dilihat dari Visi dan Misi Pembangunan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat di atas, dapat disimpulkan bahwa tugas dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan berkaitan dengan Misi Pembangunan ke 2 yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip *good governance*. Hal tersebut dikarenakan bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang berkualitas tidak terlepas dari pengendalian administrasi pembangunan yang efektif dan efisien.

3. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan visi dan misi tersebut di atas, **tujuan dan sasaran strategis** yang ingin dicapai pada Biro Administrasi Pembangunan beserta Indikator Kinerja Utama (IKU) Biro Administrasi Pembangunan tahun anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.1

Sasaran Startegis dan Indikator Kinerja Utama

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	Indeks kualitas pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat	Baik

B. PERJANJIAN KINERJA

Dalam perjanjian kinerja ini dijabarkan indikator keberhasilan kinerja dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro Administrasi Pembangunan untuk tahun anggaran 2021 dan merupakan tolak ukur ketercapaian sasaran strategis yang ditetapkan dalam RENSTRA.

Tabel 2.2

Perjanjian Kinerja Biro Administrasi Pembangunan

Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	Indeks kualitas pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat	Baik



No.	Program	Anggaran Perubahan	Keterangan
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	171.067.216	APBD
2.	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	9.345.871	APBD
3.	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	660.831.293	APBD
TOTAL		841.244.380	



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Biro Administrasi Pembangunan telah menetapkan sasaran strategis dan indikator kinerja utama pada tahun berjalan melalui Rencana Strategis Biro Administrasi Pembangunan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018-2023.

Sasaran strategis Biro Administrasi Pembangunan telah tertuang dalam program strategis dimana pada Program Kebijakan Administrasi Pembangunan yang terbagi dalam 2 (dua) kegiatan yaitu Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah dan Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

Biro Administrasi Pembangunan pada tahun anggaran 2021 melaksanakan tugas, fungsi dan tata kerja melalui 1 (satu) program strategis dengan 2 (dua) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan serta ditunjang oleh 2 (dua) program rutin/penunjang dengan 7 (tujuh) kegiatan didalamnya. Melalui program dan kegiatan tersebut, total pagu secara keseluruhan dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) 2021 berjumlah Rp. 841.244.380,00.

Pelaksanaan evaluasi kinerja tahun 2021 dilakukan terhadap capaian kinerja organisasi dengan menganalisis pelaksanaan kegiatan-kegiatan strategis dalam rangka mencapai sasaran strategis dan indikator yang telah ditetapkan sebelumnya. Capaian kinerja organisasi dapat dilihat dari analisa pada tiap-tiap sasaran strategis. Adapun Biro Administrasi Pembangunan memiliki 1 (satu) sasaran strategis yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

- 1. Sasaran Strategis, Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan.**
 - a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021 untuk Sasaran Strategis Pertama.**



Analisa dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi kinerja tahun 2021 serta dijelaskan pula penggunaan sumber daya dan program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja.

Untuk sasaran strategis tersebut, didukung oleh 1 (satu) program dengan capaian rincian indikator kinerja antara lain :

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Terhadap Sasaran Strategis Pertama

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	Indeks kualitas pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat	Baik	Baik Sekali (Bobot 96,18)	100%

Penjelasan :

Dari tabel diatas perhitungan Indeks kualitas pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat merupakan hasil perhitungan Indikator Program. Hasil persentase tersebut kemudian dihitung berdasarkan formulasi yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu untuk menemukan Indeks kualitas pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan jumlah dari Persentase Perangkat Daerah dalam ketepatan sasaran pelaksanaan pembangunan daerah (Bobot 30%) ditambah Persentase Kab/Kota dalam ketepatan sasaran pelaksanaan pembangunan wilayah (Bobot 30%) ditambah Persentase Perangkat Daerah dalam tingkat kepatuhan pada system pelaporan pelaksanaan pembangunan (Bobot 40%) dengan Kriteria untuk menentukan capaiannya adalah jika hasil kualitas Pengendalian Adm. Pembangunan bernilai 0-20 (Buruk); 21-40 (Kurang Baik); 41-60 (Cukup Baik); 61-80 (Baik); dan 81-100 (Baik Sekali).



Dari realisasi yang dicapai tahun 2021 adalah :

- a. Persentase Perangkat Daerah dalam ketepatan sasaran pelaksanaan pembangunan daerah sebesar 91,18%
- b. Persentase Kab/Kota dalam ketepatan sasaran pelaksanaan pembangunan wilayah sebesar 97,43%
- c. Persentase Perangkat Daerah dalam tingkat kepatuhan pada system pelaporan pelaksanaan pembangunan sebesar 99,00%.

Setelah dikali bobot yang ditetapkan maka didapat hasil Kualitas Pengendalian Adm. Pembangunan sebesar **96,18**, sesuai nilai maka dikategorikan dengan “Baik Sekali”.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Berdasarkan data di atas, capaian indikator kinerja utama sudah cukup baik dengan persentase mencapai 100%, hal tersebut juga dipengaruhi dengan penggunaan sumber daya seperti yang dapat ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis Pertama

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi (%)
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan (2 Kegiatan dan 6 Sub Kegiatan)	660.831.293	659.543.372	99,81	100,00	0,19

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 99,81% dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 0,19%

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja tersebut juga tidak terlepas dari pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian masing-



masing sasaran strategis. Sasaran tersebut dalam rangka Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan ditunjang oleh 1 (satu) Program dengan 2 (dua) Kegiatan dan 6 (enam) Sub Kegiatan dengan dengan capaian kinerja kegiatan rata-rata 100%. Kegiatan-kegiatan dalam hal pengendalian administrasi pembangunan ini sebagian besar dilaksanakan dalam bentuk rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengendalian administrasi tiap-tiap PD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Kab/Kota se-Kalimantan Barat.

b. Perbandingan antara realisasi/capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun sebelumnya untuk Sasaran Strategis.

Biro Administrasi Pembangunan tahun 2021 telah melakukan penyesuaian Indikator Kinerja Utama yang berbeda dari periode sebelumnya namun masih dalam kontesk yang sama, untuk itu indikator yang digunakan adalah indikator yang telah disesuaikan.

Adapun perbandingan kinerja berdasarkan capaian IKU beberapa tahun terakhir yang disajikan pada tabel berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	2019		%	2020		%	2021		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	Baik	Baik Sekali	100%	Baik	Baik (Nilai : 76,23)	100%	Baik	Baik Sekali (Nilai : 96,18)	100%

c. Perbandingan antara realisasi/capaian kinerja sampai tahun 2021 dengan target RENSTRA untuk Sasaran Strategis Pertama.

Analisa dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan akhir tahun 2021 dengan target yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi. Indikator yang digunakan adalah Indikator Kinerja Utama pada Sasaran Strategis Pertama Biro Administrasi Pembangunan, dan disajikan pada tabel berikut.



Capaian Kinerja Terhadap Sasaran Strategis

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN UTAMA	REALISASI				TARGET 2023
			2020	2021	2022	2023	
1	2	3		4	5		6
1	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	Indeks kualitas pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat (IKU RENSTRA 2019-2023)	100%	100%	-	-	100%

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja pada tahun sebelumnya juga mencapai target 100% sesuai dengan pembobotan yang telah dilakukan dalam pengukuran kinerja.

d. Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan untuk Sasaran Strategis Pertama.

Dalam rangka mewujudkan pengendalian administrasi pembangunan yang efisien dan efektif, Biro Administrasi Pembangunan melalui tugas fungsi dan tata kerjanya mengkoordinir seluruh Satuan Organisasi Perangkat Daerah (PD) di Provinsi Kalimantan Barat serta memfasilitasi Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat dalam hal pengendalian administrasi pembangunan baik untuk pelaksanaan maupun pelaporan. Dari hasil pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan selama tahun 2021, seluruh PD melaporkan pelaksanaan pembangunan baik realisasi keuangan dan fisik dapat tepat waktu dengan fasilitasi yang ditunjang dengan teknologi informasi.

Dari hasil pelaksanaan program/kegiatan di atas, tentunya terdapat beberapa **hambatan/permasalahan** yang dihadapi. Berikut disampaikan beberapa hambatan/permasalahan yang dihadapi, yaitu :

- 1) Bidang Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
 - a. Adanya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebanyak 2 (dua) kali perubahan



- b. Adanya Rasionalisasi Anggaran menyebabkan adanya kegiatan yang tidak terlaksana seperti Monitoring / Evaluasi, rapat koordinasi dalam rangka penyelenggaraan Pembangunan dengan OPD/Biro/UPT di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang di rencanakan dalam DPA Biro Administrasi Pembangunan dilaksanakan setiap Triwulan
 - c. Perubahan Struktur Organisasi yang mengakibatkan belum memadainya sarana dan Prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di Biro administrasi Pembangunan.
 - d. Terjadinya perubahan kebijakan dikarenakan kondisi Pandemi Covid-19
- 2) Bidang Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah
- a. Adanya Pemotongan Dana DAK karena adanya pemangkasan Covid -19 sehingga sangat berpengaruh terhadap capaian kerja;
 - b. Pada Dana Tugas Pembantuan biasanya Dana tersebut di keluarkan pada pertengahan tahun;
 - c. Untuk Dana DAK Fisik dan non fisik adanya perubahan Nomenklatur dan Perubahan Nomor rekening karena ada pergeseran Anggaran;
 - d. Juknis yang sering terlambat dan selalu berubah sehingga harus merevisi kembali kegiatan yang telah direncanakan termasuk adanya Refocusing Anggaran;
 - e. Adanya perubahan aturan pengadaan Barang dan Jasa dari peraturan LKPP No 9 tahun 2018 menjadi peraturan lembaga LKPP No 12 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa, Pemerintah melalui penyedia, dan saat ini sedang menunggu revisi dan inspektorat terhadap Daftar Kontrak kegiatan ke Aplikasi OMSPAM;
 - f. Kegiatan sudah mulai berjalan namun tetep mengikuti peraturan Social distancing terkait pandemi Covid-19 hal ini juga menyebabkan kegiatan tidak bisa terlaksana secara maksimal



dan untuk proses pencairan yang sudah dilaksanakan Proses penginfutan LS-DAK pada Aplikasi Simakda (On Proses);

- g. Masih banyak yang terlambat melakukan lelang /Tender Untuk beberapa Kegiatan sampai dengan Triwulan ke III sehingga waktu masa pelaksanaan menjadi terlambat dan perlu revisi anggaran melalui Anggaran tambahan /perubahan;
- h. Untuk Pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa lainnya masih belum optimal terlaksana karena prioritas utama pengadaan hanya untuk disektor Kesehatan guna menunjang pencegahan dan Penanggulangan dampak Covid-19;
- i. Untuk Pelatihan dan Bimbingan teknis belum dapat dilaksanakan secara tatap muka sehingga pelaksanaanya belum semuanya optimal di sebabkan terbatasnya waktu pembelajaran hanya melalui meeting zoom pada semua instansi;
- j. Masih terdapat pelaksanaan pekerjaan pengadaan tidak tepat waktu tidak sesuai dengan masa/waktu Kontrak yang telah di tentukan sehingga pelaksanaan Administrasi pembangunan mengalami hambatan baik dalam penggunaan Anggaran DAK Fisik dan Non Fisik;
- k. Masih terdapat unit kerja Penerima Dana Alokasi APBN (Dana DAK dan Tugas Pembantuan) yang belum Menyampaikan laporan secara tepat waktu. sehingga harus dilakukan Jemput Bola;
- l. Terbatasnya SDM yang menangani tugas monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat;
- m. Belum optimalnya koordinasi antara unit kerja terkait dalam pemanfaatan dana APBN yang ada untuk menunjang kegiatan pembangunan daerah, baik sebagai unit kerja pengelola dana APBN maupun unit kerja terkait yang menangani administrasi pelaporan dan pengendalian pembangunan;

3) Bidang Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan



- a. Terkait beberapa kasus permasalahan dan kendala dilapangan dalam pelaksanaan TEPR (Tim Evaluasi Penyerapan Realisasi Anggaran) di Provinsi Kalimantan Barat yaitu terdapat beberapa OPD yang memiliki Akun Double, sehingga menyulitkan Pejabat penghubung untuk memonitoring laporan realisasi OPD pada SISMONTEPRA, ada beberapa OPD dimana penginputan Struktur Anggaran jumlah total pagu berbeda dengan yang ada di DPA, Target pada Aplikasi SISMONTEPRA beberapa OPD lebih dari Pagu setelah refocusing, beberapa OPD belum melakukan penginputan pada Paket Pengadaan Barang Jasa, hal ini disebabkan oleh OPD belum mengupdate, belum merencanakan paket strategisnya, bahkan ada beberapa OPD yang operator SISMON-TEPRA masih baru sehingga perlu adanya pelatihan dan bimbingan.
- b. Biro Administrasi Pembangunan melalui bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Sub Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah telah melakukan Monitoring proyek-proyek Strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada Aplikasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Strategis (AMEPS) namun terkait pengisian aplikasi sering terhambat.
- c. Sehubungan dengan adanya perubahan nomenkelatur yang ada di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Biro Administrasi Pembangunan menjadi Unit Organisasi yang berdiri sendiri dengan struktur dan perangkat kerja yang baru. Perubahan ini tidak serta merta diikuti dengan pemenuhan sarana dan prasarana kerja pendukung tugas dan fungsi. Oleh sebab itu, sarana dan prasarana yang kurang memadai hingga saat ini sangat menghambat pelaksanaan Tugas dan Fungsi.
- d. Kurangnya sarana dan prasarana kerja.
- e. Selain hal tersebut diatas, kondisi kerja saat pandemi COVID-19 ini juga berpengaruh terhadap serapan anggaran. Refocusing



anggaran yang terjadi beberapa kali juga tidak lepas penyebab kurang optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi.

Dari hambatan/permasalahan yang dihadapi, upaya **pemecahan/solusi** guna mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran diatas adalah sebagai berikut.

1) Bidang Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

Kedepan diharapkan terpenuhinya pelaksanaan program/kegiatan sesuai rencana yang telah ditetapkan dalam DPA Biro Administrasi Pembangunan, disamping itu karena merupakan Biro yang baru terbentuk, dukungan sarana maupun prasarana untuk menunjang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah sangatlah diperlukan, yang mana pada saat ini dirasakan masih kurang memadai.

2) Bidang Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah.

a. Melaksanakan Pemantauan rutin terhadap perkembangan kegiatan Administrasi Pembangunan Wilayah di Kabupaten/Kota dengan cara melakukan upaya melalui :

- Permintaan laporan secara Triwulan, Semesteran dan Tahunan;
- Rapat Teknis internal secara Rutin setiap Triwulan;
- Pemanfaatan Aplikasi e-monev dan sidak-kalbar;
- Melakukan meeting zoom untuk koordinasi;
- Melakukan pembinaan, pengendalian dan evaluasi;
- Menindak lanjuti Surat Edaran dari Gubernur dan Setda Provinsi Kalimantan Barat Hal Pelaksanaan evaluasi dan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah.



- b. Menyebarluaskan Informasi baru dan penting (Update) berkenaan dengan penyelenggaraan Pembangunan melalui Surat edararan kepada seluruh unit kerja.
 - c. Mengingatkan unit kerja terkait untuk memacu Perkembangan pembangunan sesuai target yang telah ditetapkan dan batas waktu yang tersedia.
 - d. Melaksanakan konsultasi ke Pemerintah Pusat untuk memperoleh informasi yang valid terhadap kebijakan/sinkronisasi permasalahan yang belum dapat diselesaikan dalam mengambil keputusan pelaksanaan pengendalian dibidang pembangunan.
- 3) Bidang Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan.
- a. Melakukan koordinasi terkaait Aplikasi yang digunakan dalam pelaporan pelaksanaan pembangunan yang ada pada Biro Administrasi Pembangunan agar dapat dilaksanakan dengan optimal.
 - b. Melakukan pembinaan terhadap tenaga administrasi yang bertugas dalam hal pelaporan pelaksanaan pembangunan di perangkat daerah yang ada agar dapat menyampaikan laporan tepat waktu.
 - c. Menyesuaikan sistem kerja dengan memadfaatkan teknologi informasi guan mengatasi kondisi pandemi yang belum selesai.

B. REALISASI ANGGARAN

Sebagaimana diuraikan di atas bahwa capaian sasaran kinerja Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun Anggaran 2021 sudah tercapai. Pada akhir tahun 2021, Alokasi dana untuk pembiayaan seluruh kegiatan yang dianggarkan sebesar Rp. 841.244.380,00 dari APBD (DPPA) dengan realisasi sebesar Rp. 839.956,459,00 atau 99,85%. Adapun rincian realisasi program/kegiatan tersebut dijabarkan pada tabel berikut.



Tabel 3.4

Realisasi Anggaran Tahun 2021 Dalam Mewujudkan Kinerja Organisasi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/kegiatan/sub kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	(%)
1	2	3	6	7
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	171.067.216,00	171.067.216,00	100
4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	77.397.985,00	77.397.985,00	100
4.01.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35.856.594,00	35.856.594,00	100
4.01.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12.231.008,00	12.231.008,00	100
4.01.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20.634.264,00	20.634.264,00	100
4.01.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.676.119,00	8.676.119,00	100
4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	29.824.418,00	29.824.418,00	100
4.01.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.100.000,00	1.100.000,00	100
4.01.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	28.724.418,00	28.724.418,00	100
4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	0,00	0,00	0
4.01.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0,00	0,00	0
4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	29.593.043,00	29.593.043,00	100
4.01.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.140.000,00	10.140.000,00	100
4.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan	5.505.000,00	5.505.000,00	100
4.01.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13.948.043,00	13.948.043,00	100
4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16.289.170,00	16.289.170,00	100
4.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.289.170,00	16.289.170,00	100
4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17.962.600,00	17.962.600,00	100
4.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5.548.100,00	5.548.100,00	100
4.01.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.414.500,00	12.414.500,00	100
4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	9.345.871,00	9.345.871,00	100
4.01.02.1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	9.345.871,00	9.345.871,00	100
4.01.02.1.01.03	Penataan Analisis Jabatan	9.345.871,00	9.345.871,00	100
4.01.08	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	660.831.293,00	659.543.372,00	99,81
4.01.08.1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	346.660.922,00	346.660.922,00	100
4.01.08.1.01.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	71.782.064,00	71.782.064,00	100
4.01.08.1.01.02	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	62.122.592,00	62.122.592,00	100
4.01.08.1.01.03	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	12.756.266,00	212.756.266,00	100
4.01.08.1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	314.170.371,00	312.882.450,00	99,59
4.01.08.1.02.01	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	107.941.931,00	106.654.010,00	98,81
4.01.08.1.02.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	151.979.784,00	151.979.784,00	100
4.01.08.1.02.03	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	54.248.656,00	54.248.656,00	100
	Total	841.244.380,00	839.956.459,00	99,85

Dari rincian anggaran di atas, hampir seluruh kegiatan terlaksana dengan sesuai harapan dengan realisasi anggaran rata-rata 99,85%. Dalam rangka mewujudkan sasaran strategis, didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp. 660.831.293,- melalui 1 (satu) Program dengan 2 (dua) Kegiatan dan 6 (enam)



Sub Kegiatan dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 659.543.372,- atau sekitar 99,81%.

--o0o--



BAB IV

PENUTUP

Pencapaian kinerja Biro Administrasi Pembangunan secara keseluruhan dapat disimpulkan berhasil memenuhi target kinerja yang ditetapkan, hal ini dapat dilihat dari pengukuran kinerja yang dilakukan bahwa indikator kinerja yang ditetapkan berhasil dicapai dalam waktu yang ditetapkan. Pencapaian kinerja tersebut tidak terlepas dari koordinasi yang terjalin baik secara horizontal maupun vertikal dalam kesatuan organisasi serta dukungan sarana dan prasarana yang cukup memadai meskipun dalam kondisi pandemi Covid-19 yang belum dapat dikategorikan membaik.

Secara umum, pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerja Biro Administrasi Pembangunan berjalan dengan lancar dan baik dengan penyerapan anggaran sekitar 99,85%.

Disampaikan juga bahwa sesuai dengan rencana kinerja tahun 2021, Biro Administrasi Pembangunan memiliki 1 (satu) sasaran strategis yang harus tercapai dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Sasaran tersebut didukung oleh beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan dengan baik, dapat dilihat dari capaian realisasi kinerja yang telah memenuhi target yang ditetapkan.

Dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian sasaran diatas, adanya hambatan/kendala tidak dapat dihindari sehingga seluruh komponen organisasi bekerja dengan maksimal baik dalam hal antisipasi maupun pemecahan solusi guna pencapaian kinerja yang optimal baik pada tahun berjalan dan tahun yang akan datang.

Demikian Laporan Kinerja Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat ini disusun sebagai laporan dan menjadi bahan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pontianak, Januari 2022

Pt. KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN,

Dra. ANA PAULA MACEDO DE SAUSA MOTA
Pembina Tingkat I
NIP. 19640403 198503 2 015



Lampiran :

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

PERANGKAT DAERAH : BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
TAHUN ANGGARAN : 2021

NO.	KEGIATAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan	Indeks kualitas pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat	Baik	Baik Sekali	100%

Perhitungan Indikator pertama :

Dari tabel diatas perhitungan Indeks kualitas pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat merupakan hasil perhitungan Indikator Program. Hasil persentase tersebut kemudian dihitung berdasarkan formulasi yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu untuk menemukan Indeks kualitas pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan jumlah dari Persentase Perangkat Daerah dalam ketepatan sasaran pelaksanaan pembangunan daerah (Bobot 30%) ditambah Persentase Kab/Kota dalam ketepatan sasaran pelaksanaan pembangunan wilayah (Bobot 30%) ditambah Persentase Perangkat Daerah dalam tingkat kepatuhan pada system pelaporan pelaksanaan pembangunan (Bobot 40%) dengan Kriteria untuk menentukan capaiannya adalah jika hasil kualitas Pengendalian Adm. Pembangunan bernilai 0-20 (Buruk); 21-40 (Kurang Baik); 41-60 (Cukup Baik); 61-80 (Baik); dan 81-100 (Baik Sekali).

Dari realisasi yang dicapai tahun 2021 adalah :

- a. Persentase Perangkat Daerah dalam ketepatan sasaran pelaksanaan pembangunan daerah sebesar **91,18%**
- b. Persentase Kab/Kota dalam ketepatan sasaran pelaksanaan pembangunan wilayah sebesar **97,43%**
- c. Persentase Perangkat Daerah dalam tingkat kepatuhan pada system pelaporan pelaksanaan pembangunan sebesar **99,00%**



dengan data tersebut maka dapat dilakukan perhitungan terhadap Kualitas Pengendalian Adm. Pembangunan dengan pembobotan sebagai berikut :

$$\boxed{91,18\% \times 30\% = 27,35} + \boxed{97,43\% \times 30\% = 29,29} + \boxed{99,00\% \times 40\% = 39,60} = \boxed{96,18 = (\text{Baik Sekali})}$$

melalui pembobotan diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas pengendalian yang dilakukan oleh Biro Administrasi Pembangunan untuk tahun anggaran 2021 memiliki predikat **BAIK SEKALI**.

Jumlah Total Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2021 : Rp. 660.831.293,00

Jumlah Realisasi Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2021 : Rp. 659.543.372,00

Pontianak, Januari 2022
Plt. KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN,

Dra. ANA PAULA MACEDO DE SAUSA MOTA

Pembina Tingkat I
NIP. 19640403 198503 2 015